

## Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Garut Tahun 2010-2020

Fazwa Al Wijdan\*, I Amaliah, AY Mafruhah

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*fazwawijdan@gmail.com, amaliah@unisba.ac.id, aymafruhah@unisba.ac.id

**Abstract.** *Poverty conditions in Garut Regency are influenced by various factors, including the rate of economic growth, the human development index, and the unemployment rate. This research aims to determine: 1) Effect of economic growth rate, human development index, unemployment rate, on the percentage of poverty; 2) The magnitude of the rate of economic growth, the human development index, the open unemployment rate, on the percentage of poverty. This research uses a quantitative descriptive approach with OLS analysis tool with the help of SPSS 23.0 software. The data used in this research is secondary data originating from the Central Statistics Agency, including data on poverty, LPE, IPM and unemployment during the 2010-2020 period. The results of this study indicate that the variable that significantly reduces the percentage of poverty in Garut Regency is IPM, while LPE and TPT have no significant effect on reducing the percentage of poverty in Garut Regency. This happens because geographically Garut Regency is surrounded by mountains from the North to the South Garut area, thus allowing for uneven development and disparities between Garut City, North Garut, and South Garut areas. Suggestions from researchers are that the Garut Regency Government should improve infrastructure such as roads, bridges, transmitter station towers to support the digital economy, and other economic supporting infrastructure in order to achieve equitable development in Garut Regency.*

**Keywords:** *The rate of economic growth, the human development index, the unemployment rate, and poverty.*

**Abstrak.** Kondisi kemiskinan di Kabupaten Garut dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, terhadap persentase kemiskinan; 2) Besarnya pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, terhadap persentase kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan alat analisis OLS dengan bantuan software SPSS 23.0. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik meliputi data Kemiskinan, LPE, IPM dan pengangguran terbuka selama rentang waktu 2010-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang signifikan menurunkan persentase kemiskinan di Kabupaten Garut adalah IPM, sementara LPE dan TPT tidak signifikan berpengaruh terhadap penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Garut. Hal ini terjadi karena Secara geografis Kabupaten Garut dikelilingi pegunungan dari Utara sampai di kawasan Garut Selatan, sehingga memungkinkan terjadinya ketidakmerataan pembangunan dan terjadi disparitas antara Kawasan Garut Kota, Garut Utara, dan Garut Selatan. Saran dari peneliti sebaiknya Pemkab Garut memperbaiki infrastruktur seperti jalan, jembatan, tower stasiun pemancar untuk menunjang ekonomi digital, dan infrastruktur penunjang ekonomi lainnya agar terjadi pemerataan pembangunan di Kabupaten Garut.

**Kata Kunci:** Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan kemiskinan.

## A. Pendahuluan

Menurut Sukirno (2006) pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro, 2011). Dari segala proses pembangunan diharapkan terciptanya sebuah pertumbuhan ekonomi di suatu daerah agar dapat terwujudnya sebuah kesejahteraan.

Pertumbuhan ekonomi di sebuah negara pada umumnya didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh tiap-tiap wilayah. Pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah dapat dilihat dari nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang umumnya dipergunakan untuk melihat kesuksesan keadaan perekonomian di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi mengukur hasil dan perkembangan suatu perekonomian dari satu periode ke periode selanjutnya (Andriyansyah, 2017).

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat perkembangan agregat pendapatan untuk masing-masing tahun dibandingkan tahun sebelumnya serta memberikan gambaran mengenai kinerja tiap kabupaten/kota dalam memanfaatkan potensi yang ada. Tinggi rendahnya laju pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan patokan untuk melihat maju tidaknya perekonomian suatu negara dan juga digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat (Litawati, 2013). Menurut Noviyanti (2014) pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara ataupun suatu daerah.

Pada tahun 2019, LPE Kabupaten Garut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya adalah berkat program kemitraan, dalam rangka percepatan akses keuangan daerah yang dinilai sangat baik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemkab Garut mengapresiasi program kemitraan yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan dalam hal ini Bank BJB melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dibuktikan dengan adanya kemitraan yang sangat baik antara beberapa pesantren yang bekerjasama dan dibiayai oleh Bank BJB dalam melakukan kegiatan usaha pembibitan dan penggemukan ternak domba dan dijual kepada *off taker* (penjamin) yang merupakan mitra Bank BJB.

**Tabel 1.** Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2018-2020 (%)

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kab. Bogor	6,19	5,85	-1,77
Kab. Sukabumi	5,79	5,81	-1,08
Kab. Cianjur	6,23	5,67	-0,78
Kab. Bandung	6,25	6,31	-1,87
Kab. Garut	4,96	5,02	-1,26
Kab. Tasikmalaya	5,69	5,43	-0,98
Kab. Ciamis	5,44	5,38	-0,14
Kab. Kuningan	6,43	6,59	0,09
Kab. Cirebon	5,02	4,68	-1,08
Kab. Majalengka	6,08	7,71	0,86
Kab. Sumedang	5,83	6,33	-1,12
Kab. Indramayu	1,26	3,2	-1,58
Kab. Subang	4,43	4,41	-1,27
Kab. Purwakarta	5	4,38	-2,05
Kab. Karawang	6,46	4,08	-3,59
Kab. Bekasi	6,07	3,94	-3,3

Kab. Bandung Barat	5,5	5,05	-2,41
Kab. Pangandaran	5,41	5,94	-0,05
Kota Bogor	6,14	6,05	-0,53
Kota Sukabumi	5,51	5,94	-1,48
Kota Bandung	7,08	6,79	-2,28
Kota Cirebon	6,21	6,29	-0,99
Kota Bekasi	5,86	5,41	-2,55
Kota Depok	6,83	6,74	-1,92
Kota Cimahi	5,68	7,85	-2,26
Kota Tasikmalaya	5,94	5,97	-2,01
Kota Banjar	5,07	5,03	1,04
<b>Jawa Barat</b>	<b>5,64</b>	<b>5,07</b>	<b>-2,44</b>

(Sumber : BPS , 2021)

Tabel 1.1 menunjukkan kondisi LPE di Jawa Barat menurut kabupaten/kota tahun 2018-2020. Kota Bandung berada di urutan teratas dengan rata-rata nilai LPE sebesar 5.705% di Periode Tahun 2018-2020. Sementara itu, LPE Kabupaten Garut pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 4,96%, pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi sebesar 5,02%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi sebesar -1,26%. Kabupaten Garut berada di posisi LPE yang relative cukup rendah jika dibandingkan dengan daerah di sekitarnya seperti Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar.

Menurut (Maratade, 2016) paradigma pembangunan yang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang di ukur dengan pembangunan manusia, dimana pembangunan manusia diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut kini menjadi perhatian khusus Pemkab Garut. IPM Garut pada tahun 2018 mencapai 65,42 % yang hanya menempati peringkat ke-25 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, atau ketiga terbawah setelah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya (Humas Pemkab Garut, 2020).

**Tabel 2.** Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/kota di Jawa Barat 2018-2020 (%)

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kab. Bogor	69,69	70,65	70,4
Kab. Sukabumi	66,05	66,87	66,88
Kab. Cianjur	64,62	65,38	65,36
Kab. Bandung	71,75	72,41	72,39
Kab. Garut	65,42	66,22	66,12
Kab. Tasikmalaya	65	65,64	65,67
Kab. Ciamis	69,63	70,39	70,49
Kab. Kuningan	68,55	69,12	69,38
Kab. Cirebon	68,05	68,69	68,75
Kab. Majalengka	66,72	67,52	67,59
Kab. Sumedang	70,99	71,46	71,64
Kab. Indramayu	66,36	66,97	67,29

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kab. Subang	68,3	68,69	68,95
Kab. Purwakarta	69,98	70,67	70,82
Kab. Karawang	69,89	70,86	70,66
Kab. Bekasi	73,49	73,99	74,07
Kab. Bandung Barat	67,46	68,27	68,08
Kab. Pangandaran	67,44	68,21	68,06
Kota Bogor	75,66	76,23	76,11
Kota Sukabumi	73,55	74,31	74,21
Kota Bandung	81,06	81,62	81,51
Kota Cirebon	74,35	74,92	74,89
Kota Bekasi	81,04	81,59	81,5
Kota Depok	80,29	80,82	80,97
Kota Cimahi	77,56	78,11	77,83
Kota Tasikmalaya	72,03	72,84	73,04
Kota Banjar	71,25	71,75	71,7
<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>71,3</b>	<b>72,03</b>	<b>72,09</b>

(Sumber : BPS, 2021)

Pada data tabel 1.2 menunjukkan IPM Kabupaten Garut pada tahun 2018 sebesar 65,42%, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 66,22%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 66,12%. Masih tertinggal oleh daerah di sekitarnya seperti kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung dan juga Kabupaten Sumedang.

Semakin baik IPM maka semakin baik pula kesejahteraannya karena seseorang mempunyai kompetensi untuk dapat mempunyai pekerjaan, namun sebaliknya semakin buruk IPM maka seseorang cenderung sulit untuk dapat memperoleh pekerjaan sehingga tak mempunyai pendapatan dan muncul permasalahan yang bernama pengangguran (Ningrum, 2017). Berdasarkan cirinya, Pengangguran dikelompokkan menjadi 4 macam, salah satunya adalah Pengangguran Terbuka, Pengangguran Terbuka adalah pencari kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Di Kabupaten Garut permasalahan pengangguran terbilang tinggi jika dibanding daerah sekitarnya karena masih minimnya lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja lokal yang ada di Kabupaten Garut (Surayanandika, 2018).

**Tabel 3.** Tingkat Pengangguran Terbuka menurut kabupaten/kota di Jawa Barat 2018-2020 (%)

<b>Kabupaten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kab. Bogor	9,83	9,11	14,29
Kab. Sukabumi	7,84	8,05	9,6
Kab. Cianjur	10,23	9,81	11,05
Kab. Bandung	5,07	5,51	8,58

<b>Kabupaten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kab. Garut	7,12	7,35	8,95
Kab. Tasikmalaya	6,92	6,31	7,12
Kab. Ciamis	4,64	5,16	5,66
Kab. Kuningan	9,1	9,68	11,22
Kab. Cirebon	10,64	10,35	11,52
Kab. Majalengka	5	4,37	5,84
Kab. Sumedang	7,54	7,7	9,89
Kab. Indramayu	8,46	8,35	9,21
Kab. Subang	8,71	8,68	9,48
Kab. Purwakarta	9,94	9,73	11,07
Kab. Karawang	9,12	9,68	11,52
Kab. Bekasi	9,74	9	11,54
Kab. Bandung Barat	8,55	8,24	12,25
Kab. Pangandaran	3,59	4,52	5,08
Kota Bogor	9,74	9,16	12,68
Kota Sukabumi	8,57	8,49	12,17
Kota Bandung	8,05	8,18	11,19
Kota Cirebon	9,07	9,04	10,97
Kota Bekasi	9,14	8,3	10,68
Kota Depok	6,66	6,12	9,87
Kota Cimahi	8	8,09	13,3
Kota Tasikmalaya	6,89	6,78	7,99
Kota Banjar	5,95	6,16	6,73
<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>8,23</b>	<b>8,04</b>	<b>10,46</b>

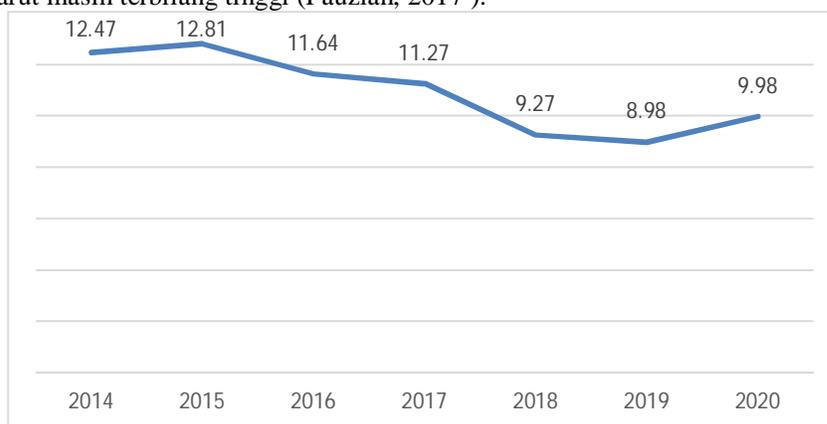
(Sumber : BPS, 2021)

Tabel 1.3 menunjukkan kondisi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Garut, pada tahun 2018 sebesar 7,12%, pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi sebesar 7,35%, dan di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 8,95%. Jika dibandingkan dengan daerah

sekitarnya seperti Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Sumedang. Kabupaten Garut menempati posisi tertinggi ke dua setelah Kabupaten Sumedang yang pada tahun 2020 sebesar 9,89 %.

Usaha untuk dapat menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya, masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup, jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka seseorang tidak termasuk kategori miskin ( Yacoub, 2012).

Di Kabupaten Garut persoalan Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor alam ataupun faktor ekonomi, untuk mengatasi kemiskinan berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut, namun tetap saja jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Garut masih terbilang tinggi (Fauziah, 2017 ).



**Gambar 1.** Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Garut 2014-2020 (%)

(Sumber : BPS, 2021)

Gambar 1. menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Garut menunjukkan kondisi yang fluktuatif di beberapa tahun, dari tahun 2017 ke 2018 persentase kemiskinan mengalami penurunan sebesar 2%, sedangkan pada tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan sebesar 1% menjadi sebesar 9,98%.

Berdasarkan paparan yang sudah dituangkan, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang:” **Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Terhadap Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Garut Tahun 2010-2020**”

### Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti tulis dan berdasar pada data data yang disajikan, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Pengaruh LPE, IPM dan TPT terhadap, persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Garut tahun 2010-2020?.
2. Berapa besarnya Pengaruh LPE, IPM dan TPT terhadap, persentase kemiskinan di Kabupaten Garut tahun 2010-2020?.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis:

1. Pengaruh LPE, IPM dan Pengangguran terbuka terhadap, persentase tingkat kemiskinan di kabupaten Garut tahun 2010-2020.
2. Besarnya pengaruh LPE, IPM dan Pengangguran terbuka terhadap, persentase tingkat kemiskinan di kabupaten Garut tahun 2010-2020.

## B. Metodologi Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode OLS (*Ordinary Least Square*). Metode OLS adalah suatu metode ekonometrik dimana terdapat variabel independen yang merupakan variabel penjelas dan variabel dependen yaitu variabel yang dijelaskan dalam suatu persamaan linear. Dalam OLS hanya terdapat satu variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen jumlahnya bisa lebih dari satu. OLS merupakan metode regresi yang meminimalkan jumlah kesalahan (error) kuadrat. Model regresi linear yang dipakai dengan metode OLS tersebut, harus memenuhi asumsi BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) dalam melakukan pendugaan interval dan pengujian parameter regresi populasi. Asumsi-asumsi BLUE yang diantaranya adalah model regresi adalah linear pada parameter-parameternya, variabel bebas adalah bukan stokastik (memiliki nilai yang tetap untuk sampel yang berulang) dan tidak ada hubungan linear yang persis antara dua atau lebih peubah-peubah bebas (no-autocorrelation), dan error term atau galat berdistribusi normal.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut adalah hasil dari uji t dan f pada penelitian ini :

**Tabel 4.** Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	60,246	7,988		7,542	,000
LPE (X1)	-,077	,126	-,087	-,613	,559
IPM (X2)	-,758	,110	-,985	-6,877	,000
TPT(X3)	-,034	,180	-,026	-,186	,858

Tabel 4. menunjukkan nilai sig LPE sebesar negative 0,559, nilai sig IPM sebesar 0,000, dan nilai sig TPT sebesar 0,858. Dari semua variabel hanya IPM (X2) yang berpengaruh terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ .

**Tabel 5.** Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	25,749	3	8,583	20,946	,001 <sup>b</sup>
	Residual	2,868	7	,410		
	Total	28,617	10			

Tabel 5. menunjukkan LPE(X1), IPM(X2), dan TPT(X3) berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terlihat dari Nilai Signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel LPE, IPM, dan TPT secara simultan berpengaruh terhadap Kemiskinan.

## D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut

1. Dari hasil estimasi dapat disimpulkan variabel yang signifikan menurunkan persentase kemiskinan di Kabupaten Garut adalah IPM, sementara LPE dan TPT tidak signifikan berpengaruh terhadap penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Garut. Secara geografis Kabupaten Garut dikelilingi pegunungan dari Utara sampai di kawasan Garut

Selatan, sehingga memungkinkan terjadinya ketidakmerataan pembangunan. Ada banyak wilayah di selatan Garut yang sering terisolasi dikarenakan longsor serta kurang memadainya infrastruktur di Garut Selatan seringkali hasil pembangunan sulit untuk terdistribusi secara baik ke wilayah Garut Selatan. Selain itu, banyak lulusan SMK yang tidak terserap pasar sehingga mempertinggi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Garut.

2. Besarnya variasi persentase kemiskinan dapat dijelaskan oleh LPE, IPM dan pengangguran terbuka sebesar 85,7% dan sisanya dijelaskan oleh variable yang tidak diangkat dalam penelitian.

### **Acknowledge**

Peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Khususnya kepada kedua pembimbing peneliti yaitu Ibu Dr. Ima Amaliah, S.E., M.Si, sebagai pembimbing pertama peneliti dan kepada Ibu Ade Yunita Mafruhah, S.E., M.Soc.,Sc selaku pembimbing kedua peneliti.

### **Daftar Pustaka**

- [1] Kotler P. *Manajemen Pemasaran [Internet]*. Jakarta: Indeks; 2005. Available from: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=618936>
- [2] Djaslim S. *Intisari Pemasaran dan Unsur-unsur Pemasaran*. Bandung: Linda Karya; 2003.
- [3] Duriyanto D. *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama; 2001.
- [4] A. Shimp T. *Periklanan Promosi: Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu. 5th ed.* Jakarta: Erlangga; 2000.
- [5] Nurhafizah, Mafruhah, Ade Yunita. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Dependency Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2019. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 109-117.